

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem pemerintahan yang berazaskan demokrasi. Saat ini demokrasi merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan berbagai lapisan masyarakat mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat kelas elit seperti kalangan elit politik, birokrat pemerintahan, tokoh masyarakat, mahasiswa dan kaum profesional lainnya.<sup>1</sup>

Kuatnya tuntutan demokrasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang ideal. Ideal berarti manusiawi dan berkeadilan.karena nilai-nilai fundamental dalam demokrasi antara lain: 1.Hak-hak asasi, 2.Kebebasan asasi, 3.Keadilan, 4.Persamaan dan 5. Keterbukaan.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan politik di Indonesia demokrasi diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat, dan partai politik merupakan lembaga untuk mengemukakan keinginan dan kepentingan rakyat, baik permasalahan ekonomi, politik, sosial maupun permasalahan bangsa secara luas.

---

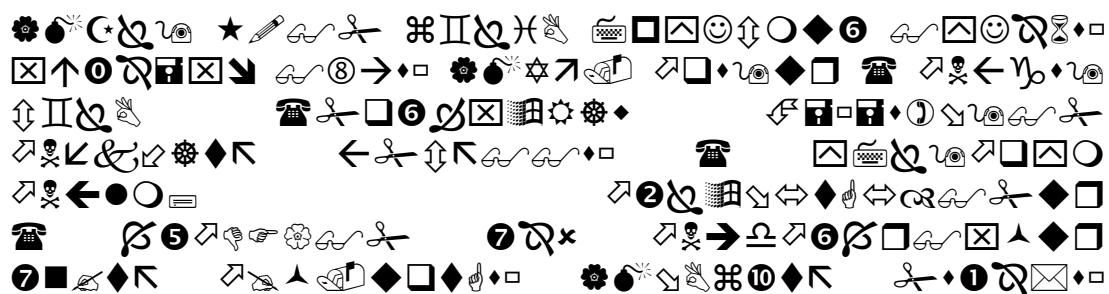
<sup>1</sup>A.Ubaidillah et al, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta, IAIN Jakarta Press, 2000, hal 161.

<sup>2</sup> Eman Hermawan, *Politik Membela yang Benar: Teori, Kritik, dan Nalar*, Jogjakarta: Yayasan KLIK dan DKN Garda Bangsa, 2001, h.49.

Cara mengemukakan keinginan rakyat melalui partai politik ini mengandung pengertian adanya eksistensi nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, sesungguhnya suatu parpol hanya dapat terbentuk jika ada sekurang-kurangnya satu kelompok lain yang menjadi rivalnya. Demokrasi yang diwujudkan dalam sebuah pesta rakyat atau Pemilu itu salah satunya memberikan hak dan keadilan terhadap semua rakyat Indonesia untuk terlibat langsung dalam proses demokrasi melalui adanya sistem keterwakilan di parlemen.<sup>3</sup>

Selain itu, peran parpol sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta sosialisasi politik harus terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis, tidak hanya administrasi dan keuangan, tapi juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar rakyat memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan bangsa ini.

Demokrasi yang esensinya adalah musyawarah telah ada dalam sistem siyasah Islam, yang dasarnya terdapat Alquran surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman:

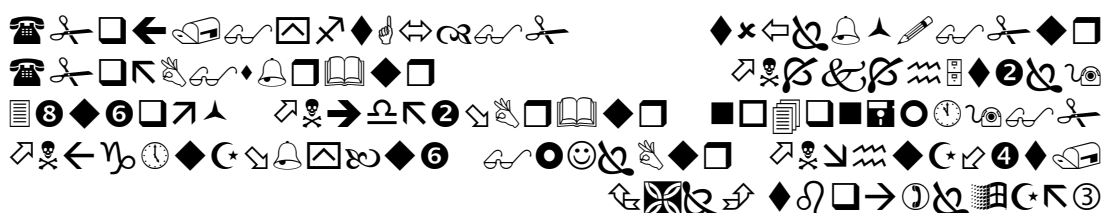


<sup>3</sup> Ng.Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), h.121



“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>4</sup>

Begitu pula dalam Surah Asy-Syura ayat 38;



“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.(.Q.S. Asy-Syura: 28)<sup>5</sup>

Demokrasi yang menjadi dasar kehidupan politik di Indonesia menjadi kabur dan tidak jelas maknanya ketika ada salah satu Propinsi di Indonesia yang mengaku mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Namun dalam praktiknya penentuan atau pengambil putusan tanpa dilakukan sebagaimana sistem demokrasi yang berkembang, sehingga sistem pemerintahan yang dipakai menggunakan sistem kerajaan yang berbau monarki.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Pengadaan Kitab Suci Alquran, 2008), h.. 128

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.. 128

Sebut saja daerah istimewa Jogjakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubono X yang satu sisi sebagai raja kesultanan Jogjakarta dan satu sisi sebagai Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta. Jadi satu sisi menganut sistem kerajaan atau monarki dan satu sisi mengikuti aturan pemerintahan yang menganut sistem demokrasi.

Demonstrasi dan dialog serta diskusi-diskusi akhir-akhir ini menggelora di Jogjakarta dan sekitarnya karena memperdebatkan RUU keistimewaan Jogjakarta, utamanya tentang pola atau mekanisme pemilihan pemimpin Jogjakarta, apakah dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana pemilihan gubernur diseluruh Indonesia, ataukah dengan menggunakan sistem penetapan. Yakni Gubernur cukup ditetapkan saja dan tidak harus menjalani sistem pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Satu ketika ada ucapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyuno yang di politisasi oleh sebagian masyarakat tentang adanya sistem "monarki" di pemerintahan Jogja. *Statman* itu yang mengakibatkan adanya komentar macam-macam dari para politisi di Indonesia.<sup>6</sup>

Sementara para pakar politik yang pro Sultan dan pihak Sultan Jogja berpendapat bahwa mereka bukanlah pelaku monarki, mereka adalah demokratisme, dengan alasan semua praktik pemerintahan dilakukan atas dasar sendi-sendi demokratisasi.

Sementara dalam sejarah siyasah juga dikenal istilah khilafah Islamiyah yang dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dan para Khulafaurrasyidin. Sistem khilafah itu dikategorikan sebagai pengejawantahan nilai-nilai demokratisasi. Sangat jelas

---

<sup>6</sup> Detik Com, Dilaporkan oleh televisi swasta nasional Metro TV dan TV One pada tanggal 24 Januari 2010.

dalam sejarah bahwa Rasulullah Saw menetapkan Abu Bakar sebagai Khalifah yang pertama dari masa kekhilafahan Khulafauurasidin.<sup>7</sup> Lalu bagaimana pandangan siyasah berkenaan dengan demokrasi monarki? Sementara dalam rumus ilmu politik sistem pemerintahan demokrasi berbeda dengan monarki, atau demokrasi hanya murni demokrasi dan monarki murni monarki, dan tidak dikenal adanya dualisme sistem demokrasi monarki.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang kajian siyasah yang relevan dengan permasalahan tersebut di atas, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Demokrasi Monarki dalam Pandangan Siyasah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana demokrasi dalam pandangan siyasah?
2. Bagaimana monarki dalam pandangan siyasah?
3. Bagaimana konsep demokrasi monarki dalam pandangan siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini:

1. Ingin mengetahui bagaimana demokrasi dalam pandangan siyasah.
2. Ingin mengetahui monarki dalam pandangan siyasah.

---

<sup>7</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban*, (Jakarta: Grafindi Persada, 1999), Cet, 2 h. 23

3. Ingin mengetahui konsep demokrasi monarki dalam pandangan siyasah.

#### **D. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang berkenaan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berazaskan suara rakyat, atau dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>8</sup> Yang penulis maksudkan adalah keputusan politik untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan berada ditangan rakyat melalui lembaga legislatif yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah.
2. Monarki adalah sistem pemerintahan yang didasarkan atas penetapan raja atau penguasa tanpa melibatkan suara rakyat.<sup>9</sup> Yang penulis maksudkan adalah keputusan politik untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan berada ditangan penguasa dan penguasa bertindak sebagai pengambil keputusan.
3. Siyasah berasal dari kata *siyasat* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah.<sup>10</sup> Bisa juga berarti pemerintahan atau politik atau pembuat kebijaksanaan.<sup>11</sup> Yang penulis maksudkan adalah politik Islam.

---

<sup>8</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), cet.1, h.173

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 174

<sup>10</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Radja grafindo Persada, 1997), h. 23

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 23

Dengan demikian yang penulis maksudkan dari judul penelitian ini adalah memadukan sistem demokrasi dengan sistem monarki ditinjau dari sudut politik Islam.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi kegunaan yaitu:

1. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambahkan khazanah ilmu pengetahuan para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, tentang demokrasi monarki dalam pandangan siyasah.
2. Sebagai bahan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian serupa dengan obyek yang lain tentang demokrasi monarki dalam pandangan siyasah.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Sepengetahuan penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pemikiran politik, tetapi subjeknya yang berbeda dengan apa yang penulis teliti, seperti penelitian Saudari Sabtuah (0001444264) yang berjudul: *Demokrasi menurut KH. Abdurrahman Wahid*. Penelitian tersebut membahas tentang apa sebenarnya demokrasi dalam pandangan KH. Abdurrahman Wahid dan kriteria-kriterianya. Penelitian tersebut berbeda dengan apa yang akan penulis teliti saat ini karena penulis membahas masalah demokrasi dan monarki secara lebih luas lagi, tidak terbatas pada pemikiran seorang tokoh saja. Oleh karenanya penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis terdahulu.

Kemudian penelitian Erny Susilawati (0001444252) yang berjudul: *Reformasi dan Demokrasi menurut Amin Rais*. Penelitian tersebut membahas tentang apa sebenarnya reformasi dan demokrasi dalam pandangan Amin Rais dan substansi yang terkandung di dalamnya. Penelitian tersebut berbeda dengan apa yang akan penulis teliti saat ini karena penulis membahas masalah demokrasi dan monarki, tidak terbatas tentang reformasinya. Oleh karenanya penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis terdahulu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*) sehingga semua data yang disajikan oleh penulis diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (Literatur).

### **2. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data yang digali dalam penelitian ini adalah demokrasi dalam pandangan siyasah, monarki dalam dalam pandangan siyasah dan demokrasi monarki dalam pandangan siyasah.

#### **b. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

##### **1) Sumber Data Primer**



Sumber data primer terdiri dari:

- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah (Ajaran Sejarah dan pemikiran)*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 1992
- .Ubaidillah et al, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta, IAIN Jakarta Press, 2000
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, Cet.II
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999
- Qamaruddin Khan, *Tentang Teori Politik*, Bandung, Pustaka, 1997

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan masalah yang penulis teliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi literatur, yaitu dengan mengkaji, mempelajari dan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang menjadi sumber data dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 4. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ditempuh beberapa langkah yaitu:

- 1) Koleksi data, yaitu penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

- 2) Editing, yaitu penulis menyeleksi kembali data yang telah terkumpul untuk memperoleh data yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian.
- 3) Klasifikasi data, yaitu penulis mengelompokkan data menurut jenisnya masing-masing.
- 4) Interpretasi data, yaitu penulis memberikan penafsiran atau penjelasan terhadap data sehingga menjadi mudah dipahami.

#### b. Analisis Data

Data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan teori-teori ilmu politik atau siyasah yang ada pada landasan teoritis pada bab II.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab I adalah pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, defenisi operasional, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian pada bab II berisi tinjauan tentang demokrasi dan monarki yang berisi pengertian demokrasi, sejarah dan teori demokrasi, karektaristik demokrasi, monarki dan bentuk-bentuk pemerintahan

Pada bab III berisi pembahasan tentang demokrasi dalam pandangan siyasah, monarki dalam dalam pandangan siyasah dan demokrasi monarki dalam pandangan siyasah disertai analisis.

Dan terakhir Bab IV adalah penutup, berisikan simpulan dan saran.

***OUT LINE***

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Definisi Operasional
- D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN TENTANG DEMOKRASI DAN MONARKI**

- A. Pengertian Demokrasi
- B. Sejarah dan Teori Demokrasi
- C. Karakteristik Demokrasi
- D. Monarki
- E. Bentuk-bentuk Negara

**BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Demokrasi dalam Pandangan Siyasah.
- B. Monarkisme dalam dalam Pandangan Siyasah.
- C. Demokrasi Monarki dalam Pandangan Siyasah.

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**DEMOKRASI MONARKI DALAM  
PANDANGAN SIYASAH**



**Oleh:**

**Rahmiyati  
NIM. 0701137904**

**INSTITUT AGAMA NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
BANJARMASIN  
1432 H/2011 M**

### DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

- A.Ubaidillah et al, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta, IAIN Jakarta Press, 2000
- Adian Husaini, *Yusril Versus Masyumi*, Jakarta : Dea Press, 2000
- Ahmad Jamil, *Seratus Muslim Terkenal*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994
- Ahmad Sumargonmo, *Terjemah Shahih Muslim*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1996
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban*, Jakarta: Grafindi Persada, 1999, Cet, 2
- Departemen Agama RI, *Al-Qur 'an dan Teiyemahnya* Semarang, CV.Toha Putera, 1996
- Eman Hermawan dan Umaruddin Masdar, *Demokrasi untuk Pemula*, Jogjakarta : Yayasan Klik dan Garda Bangsa, 2001
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2007), h. 1267
- Hasan Shadily, *Ensikiopedia Indonesia*, Jakarta : Ichtiar Bana Van Hoeve Jilid IT, t.th
- Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hazaz Al Qusairi An nasa'bu ry, *Shahih Muslim Juz 2*, Bairut: Darul Fiqri, 200-261 H
- Imam Anshori Saleh,, *Negara dan Demokrasi*, Jakarta : Erlangga, 1999, Cet.I
- Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991
- J. Moelong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 1999
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan pemikira*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 1992
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, dan *Politik, Teori belah Bambu Masa Deniokrasi Teipimpin..* Jakarta: Gema insani Press, 1996
- Rasyid Ridha, *Al-Khlafah au al-Imamah*, Al\_manar, Al-Qahirah, t, th.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (akarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), cet.1, h.173

- Ng.Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), h.121
- Noer, Deliar, *Partai Dipentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkenibanganpolitik Indonesia 1945-1965*, Bandung : IKAPI 2000
- Qamaruddin Khan, *Tentang Teori Politik*, Bandung, Pustaka, 1997
- Robert A. Dahi, *Dilemmas of Pluralist Deniocracv*, New Haven dan London: Yale University Press, 1982
- Rodee Canton Clymer dan Christol Carl Quimby, *Introduction to Political Science*, New York : McGraw-Hill, 1983
- Saefuddin. AM, *Jjtihad Politik Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Said Aqiel Siradj, *Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999
- Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Caleg Perempuan Amien Rais tentang Demokrasi*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Zaidan Juhri, *Tarikh al-Tamaddun al-Islam*, Dar al-Hilal al-Qahirah, t, th.

**Pembimbing I**  
**Prof.Dr. Ahmadi Hasan, MH**

**Pembimbing II**  
**Hj. Hayatun Naimah, M. Hum**